

Evaluasi Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan di PKBM Perintis Sukabumi: Implikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Nazwa Alya Salsabila^{1}, Yunisa Alifiah²*

¹*Universitas Nusa Putra*

²*Universitas Nusa Putra*

Email: nazwa.alya_ak23@nusaputra.ac.id^{1*}, yunisa.alifiah_ak23@nusaputra.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan di PKBM Perintis Sukabumi serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh adanya dugaan kasus penyelewengan dana yang melibatkan pengurus lembaga tersebut, termasuk pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi aktual di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan tidak dilakukan secara transparan, mekanisme pertanggungjawaban lemah, sistem pengendalian internal tidak diterapkan secara efektif, dan terdapat indikasi kuat penyimpangan dana. Temuan ini menunjukkan urgensi penguatan sistem pengelolaan keuangan melalui digitalisasi pelaporan, penerapan audit internal, dan penggunaan akuntansi forensik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola lembaga dan pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik di sektor pendidikan nonformal.

Kata kunci: BOP Kesetaraan, akuntabilitas keuangan, transparansi, akuntansi forensik, PKBM

Abstract: This study aims to evaluate the management of the Equality Operational Education Assistance Fund (BOP Kesetaraan) at PKBM Perintis Sukabumi and its implications on financial transparency and accountability. The background of this research is based on allegations of fund misappropriation involving the institution's management, including data falsification and manipulation of financial reports. The study employs a qualitative approach using a case study method to explore in-depth information about the actual conditions in the field. Data collection techniques include in-depth interviews, document studies, and observation. The results indicate that financial reporting was not conducted transparently, accountability mechanisms were weak, internal control systems were not effectively implemented, and there were strong indications of fund misappropriation. These findings highlight the urgency of strengthening the financial management system through digital reporting, the implementation of internal audits, and the use of forensic accounting. This study is expected to contribute to institution managers and policymakers in creating better financial governance systems in the non-formal education sector.

Keyword: *Equality Operational Education Assistance Fund (BOP Kesetaraan), financial accountability, transparency, forensic accounting, PKBM*

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam sektor ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C. Untuk mendukung operasional lembaga semacam ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kelembagaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan potensi penyimpangan, terutama di aspek pengelolaan keuangan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan dana BOP Kesetaraan di PKBM Perintis Sukabumi, yang meliputi manipulasi data peserta didik, pelaporan keuangan fiktif, hingga lemahnya pengawasan internal. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam sistem tata kelola keuangan lembaga pendidikan nonformal yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.

Situasi ini menjadi perhatian penting karena dana BOP Kesetaraan bersumber dari anggaran negara dan seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Ketika dana tersebut tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, maka tujuan program menjadi tidak tercapai, dan kepercayaan publik terhadap lembaga

pendidikan nonformal bisa menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengelolaan dana, termasuk meninjau sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal telah diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di PKBM Perintis Sukabumi. Fokus utama adalah menilai praktik pengelolaan dana BOP Kesetaraan serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengkaji kemungkinan penerapan akuntansi forensik sebagai instrumen pengawasan yang dapat memperkuat sistem keuangan lembaga pendidikan nonformal.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini berfokus pada empat komponen utama: transparansi keuangan, akuntabilitas, pengendalian internal, dan akuntansi forensik.

1. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan merujuk pada keterbukaan dalam penyajian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Gupta et al. (2018) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama dalam tata kelola keuangan publik yang baik, karena memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan otoritas terkait untuk menilai apakah dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Dalam lembaga pendidikan nonformal, transparansi tidak hanya berupa penyampaian laporan keuangan secara terbuka, tetapi juga kemudahan akses terhadap informasi penggunaan dana, anggaran kegiatan, dan hasil capaian program.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan dan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Rohman dan Wulandari (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam lembaga pendidikan harus diwujudkan melalui sistem pelaporan yang dapat diverifikasi dan diaudit secara independen. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, lembaga pendidikan rawan melakukan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.

3. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efisien dan efektif. Menurut Nguyen dan Pham (2021), sistem ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Di PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya, pengendalian internal mencakup pencatatan transaksi yang akurat, verifikasi silang data peserta didik, serta pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penggunaan dana.

4. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah bidang spesialisasi dalam akuntansi yang digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan terjadinya kecurangan atau penyimpangan keuangan secara legal dan sistematis. Khan dan Pervaiz (2020) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat menjadi alat yang efektif dalam sektor pendidikan untuk menelusuri indikasi penyimpangan penggunaan dana publik. Teknik ini melibatkan analisis dokumen keuangan, wawancara

investigatif, serta audit forensik yang berfokus pada pencarian bukti kecurangan.

KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini dibangun atas dasar premis bahwa pengelolaan dana BOP Kesetaraan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sangat rentan terhadap penyimpangan. Ketika lembaga pendidikan tidak memiliki sistem yang mendukung keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas, maka penggunaan dana menjadi tidak terkontrol dan sulit diawasi oleh pihak eksternal.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori transparansi dan teori akuntabilitas. Teori transparansi digunakan untuk menilai sejauh mana informasi terkait penggunaan dana BOP dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Keterbukaan informasi keuangan merupakan indikator awal dari manajemen yang sehat, dan menjadi dasar bagi pengawasan publik.

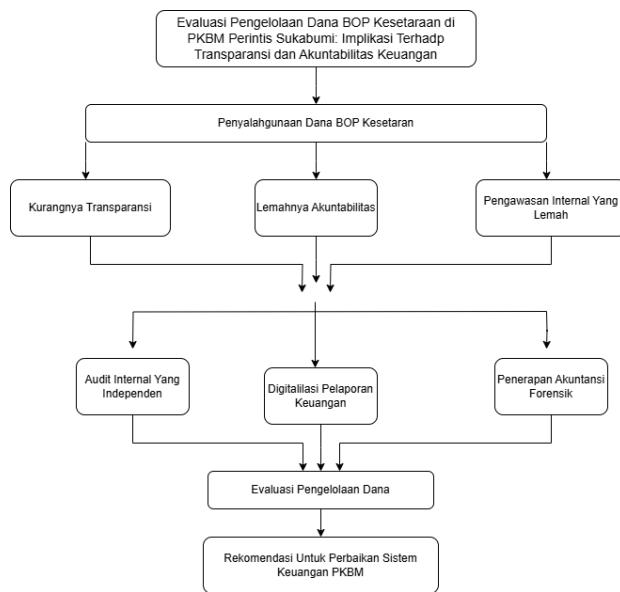
Sementara itu, teori akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana pengelola PKBM mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOP secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Ketiadaan laporan keuangan yang dapat diaudit, minimnya partisipasi dalam proses pelaporan, serta lemahnya verifikasi data menjadi tanda bahwa akuntabilitas belum berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, sistem pengendalian internal dan akuntansi forensik diposisikan sebagai pendekatan intervensi. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa

penggunaan dana dilakukan sesuai prosedur dan dapat dikontrol melalui mekanisme formal seperti SOP, pencatatan, serta verifikasi berjenjang. Akuntansi forensik digunakan sebagai alat analisis untuk mendeteksi dan menginvestigasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana BOP, terutama dalam situasi ketika pelaporan tidak mencerminkan kondisi riil.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini memadukan pendekatan deskriptif dan analitis terhadap tata kelola dana BOP Kesetaraan, dengan tujuan akhir yaitu memberikan rekomendasi nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan nonformal.

Alur berpikirnya adalah sebagai berikut:



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam dan kontekstual, terutama dalam

menggali pengalaman dan pandangan informan terkait praktik pengelolaan dana BOP Kesetaraan. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara detail kondisi pengelolaan dana di satu lokasi tertentu, dalam hal ini PKBM Perintis Sukabumi, guna memahami realitas dan permasalahan yang dihadapi secara lebih komprehensif.

Penelitian dilakukan di PKBM Perintis Sukabumi, sebuah lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesetaraan Paket A, B, dan C. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu informan yang dianggap mengetahui secara langsung proses pengelolaan dana BOP. Informan utama terdiri atas:

- Operator Dapodik (yang bertanggung jawab atas pendaftaran peserta didik)
- Staf keuangan PKBM
- Tutor/pendidik
- Perwakilan Dinas Pendidikan sebagai pengawas eksternal

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh berbagai perspektif dari pihak internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana BOP.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik utama digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. **Wawancara Mendalam** Dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi dari informan utama mengenai kebijakan, prosedur, praktik penggunaan dana, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan.
2. **Studi Dokumentasi** Meliputi penelaahan dokumen-dokumen terkait seperti laporan pertanggungjawaban dana BOP, dokumen anggaran, data Dapodik, dan dokumen administrasi lainnya. Teknik ini

membantu memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara.

3. **Observasi Non-partisipatif** Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan dana di lapangan, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan, serta keterlibatan aktor-aktor dalam proses pengambilan keputusan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

- Reduksi Data: Menyortir dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan pemahaman.
- Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan pola-pola temuan dan mengaitkannya dengan teori serta studi sebelumnya.

Selain itu, **triangulasi sumber dan metode** digunakan untuk meningkatkan validitas data, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi empat temuan utama terkait dengan pengelolaan dana BOP Kesetaraan di PKBM Perintis Sukabumi, yaitu: (1) rendahnya transparansi keuangan, (2) lemahnya akuntabilitas, (3) tidak berfungsiya sistem pengendalian internal, dan (4) adanya indikasi penyimpangan dana. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi faktor utama lemahnya tata kelola

keuangan lembaga pendidikan nonformal.

1. Transparansi Keuangan

Salah satu temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah tidak adanya sistem pelaporan keuangan yang terbuka di PKBM Perintis Sukabumi. Informasi terkait penggunaan dana tidak tersedia secara publik dan tidak dipublikasikan kepada pemangku kepentingan internal seperti tutor, peserta didik, dan wali murid.

Tidak adanya sistem pelaporan digital dan akses terhadap informasi keuangan menyebabkan masyarakat sulit melakukan kontrol sosial. Padahal, transparansi merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. Kurangnya dokumentasi yang dapat diakses secara terbuka membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dana.

2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOP di PKBM Perintis Sukabumi juga ditemukan sangat lemah. Laporan keuangan yang disusun hanya bersifat formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif kepada Dinas Pendidikan, tanpa ada audit independen. Tidak terdapat bukti adanya keterlibatan pihak lain dalam proses penyusunan laporan, seperti partisipasi tutor, orang tua, atau komite lembaga.

Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban keuangan tidak memuat rincian penggunaan dana secara menyeluruh, sehingga sulit dilakukan penelusuran terhadap realisasi anggaran dibandingkan dengan perencanaan awal.

3. Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal di PKBM Perintis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ditemukan Standard Operating Procedure (SOP) atau kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme penggunaan dana. Selain itu, proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku

kas sederhana, yang rawan terhadap kesalahan pencatatan maupun kecurangan.

Ketidakteraturan dalam pencatatan juga diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh pihak pimpinan lembaga. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam proses administrasi keuangan, serta tidak terdapat audit internal yang dilakukan secara berkala.

4. Indikasi Penyimpangan Dana

Dari hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan adanya indikasi kuat terhadap penyimpangan dana. Beberapa narasumber menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta didik yang tercatat dalam sistem Dapodik dengan realitas peserta yang aktif mengikuti pembelajaran. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa data Dapodik dimanipulasi untuk memperoleh dana lebih besar dari yang seharusnya.

Selain itu, beberapa bukti dokumen menunjukkan adanya pengeluaran fiktif yang tidak bisa dibuktikan dengan kwitansi sah. Ketiadaan bukti transaksi resmi menimbulkan keraguan terhadap validitas laporan keuangan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik perlu diterapkan untuk menelusuri dan membuktikan adanya penyimpangan tersebut secara sistematis dan berbasis data. Audit forensik dapat membantu mendeteksi pola-pola manipulasi yang tidak dapat diidentifikasi melalui audit konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan di PKBM Perintis Sukabumi belum berjalan

sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, yang semestinya mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah rendahnya transparansi, yang tercermin dari tidak adanya pelaporan keuangan secara terbuka serta terbatasnya akses informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, aspek akuntabilitas juga masih lemah, terlihat dari laporan keuangan yang hanya disusun untuk kepentingan administratif tanpa melalui proses audit atau evaluasi independen. Selain itu, sistem pengendalian internal di lembaga ini belum berjalan efektif, ditandai dengan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP), pencatatan keuangan manual yang tidak terdokumentasi dengan rapi, serta lemahnya fungsi pengawasan dari internal lembaga. Penelitian ini juga menemukan adanya indikasi penyimpangan, seperti dugaan manipulasi data Dapodik dan laporan pengeluaran yang tidak sesuai kenyataan, yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari otoritas terkait. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik di tingkat pendidikan nonformal masih menghadapi tantangan serius, dan jika tidak segera dibenahi, dapat berimplikasi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis komunitas.

REFEREENSI

- Gupta, S., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2018). Improving Public Sector Financial Management through Transparency and Accountability. *Journal of Public Budgeting*, 24(3), 212–230.
- Khan, M., & Pervaiz, K. (2020). Forensic Accounting Techniques and Corruption Prevention in Education Funding. *International Journal of Forensic Accounting*, 12(1), 45–60.
- Rohman, A., & Wulandari, T. (2020). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOP di Lembaga Pendidikan Nonformal. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 5(1), 33–45.
- Nguyen, T. P., & Pham, H. D. (2021). The Role of Internal Control in Educational Budget Efficiency. *International Education Journal*, 9(2), 101–112.
- Handayani, S., et al. (2022). Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Kecurangan Dana BOP di Pendidikan Kesetaraan. *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Pendidikan Indonesia.